

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALIATAS LAPORAN
KEUANGAN**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jember)

***THE EFFECT OF IMPLEMENTING LOCAL GOVERNMENT INFORMATION
SYSTEMS, INTERNAL CONTROL AND THE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT***

(Study On Regional Financial and Asset Management Bodies in Jember District)

April Dwi Wulandari¹, Anik Yuliaty²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur^{1,2}

19013010058@student.upnjatim.ac.id¹ , anikyuliaty.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and test empirically the effect of the application of Regional Government Information Systems, Internal Control and Utilization of Information Technology on the quality of financial reports of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jember Regency. This research uses a quantitative approach, using primary data through questionnaires. The subjects of this study are employees who carry out accounting or financial administration functions who have worked for 2 years with a minimum of high school education in all majors. The sample in this study used no-probability sampling with a purposive sampling technique with a total of 45 samples that met the criteria. The analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with assistance software IBM SPSS Statistics 26. The results of this study indicated that (1) the application of the Regional Government Information System has a significant positive effect on the quality of financial reports at the BPKAD of Jember Regency. (2) Internal control has a significant positive effect on the quality of financial reports at BPKAD Jember Regency. (3) Utilization of information technology has a significant positive effect on the quality of financial reports at BPKAD Jember Regency.

Keywords: *Regional Government Information System, Internal Control, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Reports*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan Sistem Informasi pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Subjek penelitian ini yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan yang telah bekerja selama 2 tahun dengan pendidikan terakhir minimal SMA semua jurusan. Sampel pada penelitian ini menggunakan noprobability sampling dengan teknik purposive sampling dengan total 45 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik

analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. (2) Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan daerah, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan dalam sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini semakin pesat seiring dengan adanya era revolusi industry 4.0. Peran Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan operasional pemerintah, maka dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelaporan pengelolaan keuangan. Memasuki era Revolusi Industry 4.0 saat ini, akuntabilitas dalam segi kinerja maupun penyajian pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan dalam rangka mengontrol kebijakan keuangan daerah (Oktaviani & Sari, 2020).

Menurut (Mulia, 2019) Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi

para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD keuangan daerah, pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Pemerintah mengembangkan sistem informasi keuangan yang mempunyai kekuatan fitur yang handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan juga mempunyai integrasi yang tinggi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan di bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah di daerah telah mengeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & M.Si,

2021). SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menjelaskan definisi Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian Intern sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Tabel 1. Kelompok Temuan SPI

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Internal</i>		
1.	Kelemahan sitem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.637 (31%)
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.791 (52%)
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	938 (17%)
Jumlah		5.366

Sumber: Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 1 disajikan jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan yaitu, keterandalan. Berdasarkan fakta terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas 541 LKPD tahun 2021 yang dilaporkan dalam IHPS 1 Tahun 2022 menemukan adanya 5.366 kasus tentang kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan keuangan republik Indonesia (BPKRI) atas sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga pemerintahan daerah yang dinilai masih lemah sehingga terungkap adanya kasus-kasus kelemahan pengendalian internal yang meliputi kelemahan sistem pengendalian pada akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan pada struktur pengendalian intern.

Tabel 2. Perkembangan Kualitas Laporan keuangan Kabupaten Jember 2017-2021

No.	LKPD (Tahun)	Kualitas Laporan Keuangan
1.	2017	Laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penyajiannya sudah konsisten dan bebas dari salah saji material.
2.	2018	BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPD. Sembilan kelemahan itu adalah: Penatausahaan aset tetap belum tertib; Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak tepat; Penyajian saldo aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum memadai; Pemanfaatan aset tanah tanpa pengenaan sewa; Realisasi belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai.
3.	2019	Dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di 13 OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp 70 miliar lebih yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan. Ke-13 OPD tersebut, yakni belanja pegawai di Bagian Bina Mental, Bagian Humas, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dispora, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan Satpol PP; LHP BPK disampaikan secara virtual, sehingga tidak ada penjelasan rinci. Misalnya, ada temuan di kas bendahara bos, tapi tidak dijelaskan secara detail.
4.	2020	Terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai; Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.
5.	2021	Bupati menegaskan bahwa masih ada persoalan yang belum selesai. Salah satunya, terkait dengan anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp 107 miliar dan saat ini masih menggantung; Penatausahaan

dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 belum diakui bukti pertanggungjawabannya.

Sumber: BPK Jatim, 2023

Berdasarkan tabel 2 pelaporan keuangan pemerintah di Kabupaten Jember merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sangat buruk sekali. Hal ini bisa dilihat dari data Perkembangan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Jember selama lima tahun, dari tahun 2017-2021. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada di Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember selama lima tahun dari tahun 2017-2021, terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember secara umum menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Masuk Di era Revolusi Industry 4.0 peran teknologi informasi dalam mendukung operasional dan manajerial pemerintah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada publik. Pemerintah diwajibkan mengembangkan dan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi

untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang maju dan baik. Beberapa kendala yang dapat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu berhubungan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dan pemutakhiran data.

Isu ini menarik untuk diteliti karena adanya fenomena menguatkan tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses meningkatkan kinerja dan reformasi manajemen keuangan pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik. Selain itu, peneliti memfokuskan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena sebagai pejabat Pengelolaan pemerintah keuangan daerah (PPKD) yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan daerah bergantung pada kualitas laporan keuangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) di dalamnya. Peneliti memilih kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember selama lima tahun, dari tahun 2017-2021 terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sangat buruk sekali.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut (Dewi et al., 2022) Teori keagenan di definisikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Hubungan keagenan juga terjadi antara pemerintah, masyarakat sebagai agen, dan pemerintah sebagai prinsipal.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang hanya mementingkan pada pemerintah dan penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraanarganya.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang di mana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang diana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memitiskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Sistem Informasi Pemerintahan daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.

Menurut (Widayanti, 2019) Penerapan Sistem Informasi berbasis teknologi dapat diukur menggunakan indikator berikut: 1) Keamanan Data, 2) Kecepatan dan Ketepatan Waktu, 3) Ketelitian, 4) Variasi laporan atau output, 5) Relevansi sistem.

Pengendalian Internal

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian Intern Pemerintah) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah) Indikator Pengendalian internal yaitu: 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian risiko manajemen, 3) Aktivitas pengendalian, 4) Sistem Informasi dan komunikasi, 5) Pemantauan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Purnama, 2020) Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan perusahaan atau badan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pengguna laporan keuangan ini meliputi: Inverstor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Penerapan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yang telah bekerja selama 2 tahun dengan pendidikan terakhir minimal SMA semua jurusan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Jember. pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purpovise sampling* yakni metode penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pria/Wanita pejabat struktural dan pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan yang terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, kemudian turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dengan minimal pendidikan terakhir SMA untuk semua jurusan; Memiliki masa kerja minimal dua tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Tabel 3. Data responden berdasarkan kriteria

Tingkat Jenjang Pendidikan	Jumlah
S2	5
S1	22
D3	7
SMA	11
Jumlah Responden	45

Sumber: Data Pegawai BPKAD kabupaten Jember, 2023

Berdasarkan tabel 3 maka peneliti menetapkan besarnya jumlah sampel sebanyak 45 responden.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber yang berupa jawaban kuesioner dari responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden akan menerima kuesioner yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemanfaatan teknologi, pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Teknik kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang dibagikan secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkann rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang (x) pada kolom yang dipilih. Kuesioner yang kembali akan diseleksi terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan dari pengisian kuesioner, sebagaimana keharusan sebagai syarat dijadikan data informasi untuk melakukan analisis.

Definisi Operasioanal dan pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen (variabel bebas) yaitu sistem informasi pemerintahan daerah (X_1), Pengendalian internal (X_2), dan Pemanfaatan teknologi informasi (X_3). Untuk variabel dependennya (variabel terikat) adalah Kualitas laporan keuangan

(Y). berikut ini merupakan definisi operasional dari masing-masing variabel:

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X_1)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem berbasis web ini juga merupakan suatu support system dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *Good Governance*. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Wower & Widhiyani, 2016) dan skala pengukuran untuk variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala *Likert* 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) Sangat Setuju. Indikator pengukuran variabel penerapan sistem informasi pemerintahan daerah meliputi: Keamanan data, Kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output dan relevansi.

Pengendalian Internal (X_2)

Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan yang didasarkan pada (Peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008) dan skala pengukuran untuk variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) Sangat Setuju. Indikator pengukuran variabel Pengendalian internal meliputi: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Desmiyawati, 2014) dan skala pengukuran untuk variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) Sangat Setuju. Indikator pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi meliputi: Komputer dan jaringan internet, pengelolaan dan keuangan, perawatan.

Kualitas Laporan keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi pemerintahan yang memebrikan manfaat dann memenuhi kebutuhan para pemakai selama periode tertentu. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan yang didasarkan pada (Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dan skala pengukuran untuk

variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) Sangat Setuju. Indikator pengukuran variabel dependen Kualitas laporan keuangan ini meliputi: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan bantuan *software* IBM SPSS *Statistics* 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	No.	r hitung	r Tabel
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1	0,563	0,2940
	2	0,657	0,2940
	3	0,670	0,2940
	4	0,621	0,2940
	5	0,670	0,2940
	6	0,564	0,2940
	7	0,556	0,2940
	8	0,631	0,2940
	9	0,574	0,2940
	10	0,556	0,2940
Pengendalian Internal	1	0,565	0,2940
	2	0,521	0,2940
	3	0,578	0,2940
	4	0,715	0,2940
	5	0,793	0,2940
	6	0,582	0,2940
	7	0,645	0,2940
	8	0,502	0,2940
	9	0,574	0,2940
	10	0,729	0,2940
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	0,757	0,2940
	2	0,602	0,2940
	3	0,568	0,2940
	4	0,603	0,2940
	5	0,631	0,2940
	6	0,661	0,2940
	7	0,645	0,2940
	8	0,581	0,2940
Kualitas Laporan Keuangan	1	0,687	0,2940
	2	0,626	0,2940
	3	0,357	0,2940
	4	0,542	0,2940
	5	0,698	0,2940
	6	0,593	0,2940
	7	0,717	0,2940
	8	0,654	0,2940
	9	0,578	0,2940
	10	0,759	0,2940

11	0,661	0,2940
12	0,557	0,2940
13	0,578	0,2940
14	0,749	0,2940

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa hasil uji validitas dari setiap variabel memiliki nilai r hitung > r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner dari penelitian ini adalah valid.

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keterangan
(X1)	0,804	0,70	Reliabel
(X2)	0,823	0,70	Reliabel
(X3)	0,776	0,70	Reliabel
(Y)	0,873	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai setiap variabel *Cronbach's Alpha* yang diperoleh lebih besar dari 0,70 maka diperoleh kesimpulan bahwa data pada penelitian ini reliable.

Tabel 6. Hasil Uji Normalis
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Keterangan	Unstandardized Residual
N	45
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{cd}

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai Signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 lebih besar nilai nilai α sama dengan 0,05, maka diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	.678	1.475
	Pengendalian Internal	.568	1.761
	Teknologi Informasi	.647	1.545

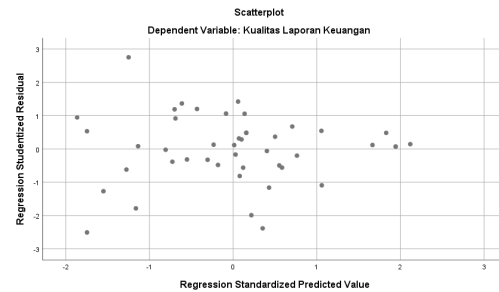
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 7, maka dapat dilihat bahwa nilai VIF masing-masing variabel independen lebih kecil daripada 10, dan nilai tolerance masing-masing

variabel independen lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas.

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 8. Analisis regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.887	7.764		.629	.533
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	.434	.166	.326	2.615	.012
	Pengendalian Internal	.370	.180	.280	2.057	.046
	Teknologi Informasi	.610	.250	.310	2.436	.019

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,887 + 0,434X_1 + 0,370X_2 + 0,610X_3$$

Tabel 9. Uji Kecocokan Model (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares		Mean Square		Sig.
	Squares	df	Square	F	
1 Regression	790.477	3	263.492	18.042	.000 ^b
Residual	598.767	41	14.604		
Total	1389.244	44			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Penerapan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal

Sumber: Data dilolah (2023)

Berdasarkan tabel 9, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut < 0,05. Karena 0,000 < 0,05 maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan.

Tabel 10. Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
	R Square	Square	Square	
1	.754 ^a	.569	.537	3.822

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Penerapan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data dilolah (2023)

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,537. Nilai tersebut dapat diartikan variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan teknologi Informasi mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 53,7% sisanya sebesar 46,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

Tabel 11. Uji t

Variabel	t	Sig.
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2,615	0,012
Pengendalian Internal	2,057	0,046
Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,436	0,019

Sumber: Data dilolah (2023)

Berdasarkan tabel 11, menjelaskan H_0 diterima apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ dan H_0 ditolak apabila nilai $\text{sig} > 0,05$. Jadi, seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima sehingga menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pemerintahan daerah memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Didukung dengan *agency theory* dimana untuk pemerintahan daerah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada principal dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah, untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, dengan adanya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat mengurangi kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu

menghasilkan laporan keuangan berkualitas serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudianing & Saputra, 2019) yang membuktikan bahwa pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang perencanaan pembangunan di daerah yang berkualitas dan SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong transparansi dan keterbukaan publik yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengendalian Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hipotesis kedua (H2) diterima sehingga menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, Pengendalian Internal berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Didukung dengan *agency theory* dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada stakeholder harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan pihak agen adalah dengan menerapkan pengendalian internal akan mampu meningkatkan reabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan pengendalian internal yang baik maka akan dapat membant menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah & Indrawati, 2019) yang

membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian (Suyudha, 2021) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga semakin tinggi SPI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hipotesis Ketiga (H3) diterima sehingga menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, Pemanfaatan Teknologi Informasi berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Didukung dengan *agency theory* dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada stakeholder harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan pihak agen adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dan terintegrasi dengan jaringan internet yang baik akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif sehingga informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridzal et al., 2022) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Penelitian (Priatiningsih & sari, 2022) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gasperz, 2019) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Maluku. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi dan terbatasnya anggaran bagi pengembangan teknologi itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan maka dapat dirangkum beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengendalian internal berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi kantor BPKAD kabupaten Jember sebaiknya lebih meningkatkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan terus meningkat pada BPKAD kabupaten Jember.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh SKPD di Kabupaten Jember.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Fernanda, N. P. R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 387–399.
- Desmiyawati. (2014). Faktor faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 2, 163–178.
- Fatimah, S., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten Bandung). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 539–553.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 186–193.
- Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 403–417.
- Priatiningsih, D., & Sari, F. M. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 101–111.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Akuntansi*, 6(3), 2944–2954. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>
- Suyudha, A. D. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–19. <http://eprints.polsri.ac.id/6613/>
- Widayanti, Y. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung). 15–35.
- Wower, S. D. D. U., & Widhiyani, N. L. S. (2016). Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada SKPD Pemkab Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1–20.